

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah Indonesia yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan pembiayaan pembangunan yang berasal dari penerimaan negara. Sumber penerimaan negara pada dasarnya terbagi dari dua sumber utama yaitu penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Semakin besar penerimaan dalam negeri, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut semakin mandiri. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dan yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pemerintahan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Di Indonesia, penerimaan dari sektor pajak cukup besar perannya, lebih dari 70% pada tahun 2009 total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

saat ini disumbang dari penerimaan perpajakan untuk mengamankan anggaran negara dalam APBN tahun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Dirjen Pajak Mekar Satria Utama berkilah mengatakan “Kewajiban formal wajib pajak Indonesia tergolong rendah. Dari tahun ketahun, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan belum juga berhasil membenahi kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya. Data Dirjen Pajak menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Angka itu jauh lebih rendah ketimbang tingkat kepatuhan 2014 yang mencapai 59,88%”. ([pemeriksaanpajak.com](http://pemeriksaanpajak.com))

Melihat besarnya kontribusi pajak terhadap negara, pemerintah berusaha melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan *Tax Reform* yang dimulai pada tahun 1983. Reformasi pajak secara besar-besaran telah merubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dengan berlakunya *Self Assessment System*, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang ke Kantor

Pelayanan Pajak tempat dimana wajib pajak tersebut terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (selanjutnya akan disebut SPT).

Tingkat kepatuhan wajib pajak RI yang rendah menyebabkan penerimaan pajak meleset pada triwulan I 2015. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan, penerimaan pajak Januari-Maret 2015 hanya Rp 170 triliun (13 persen). Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan untuk Dirjen Pajak sebesar Rp 1.296 triliun.

"Tak tercapainya target penerimaan pajak masih disebabkan kepatuhan wajib pajak," kata Bambang usai melaporkan penerimaan pajak kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (8/4). Dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya pun, perolehan Dirjen Pajak pada triwulan I 2015 masih lebih kecil. Pada triwulan I 2014, Dirjen Pajak bisa meraup Rp 188,5 triliun.

Menkeu menjelaskan, data informasi pajak yang dihimpun Dirjen Pajak sudah baik dan akurat. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah membuat setoran pajak tersendat. Menyikapi fenomena ini, Bambang berjanji melakukan pembinaan terhadap wajib pajak sehingga setoran pajak bisa meningkat signifikan.

Dengan target ambisius nyaris Rp 1.300 triliun tahun ini Dirjen Pajak memang harus kerja ekstrakeras. Minimal Dirjen Pajak harus bisa menarik pajak Rp 108 triliun per bulan untuk bisa mencapai target. Sehingga, idealnya pada tiga bulan pertama tahun ini setoran yang masuk sudah mencapai Rp 324,9 triliun. Agar

bisa memenuhi target, sembilan bulan ke depan Dirjen Pajak harus menggenjot penagihan minimal Rp 125 triliun per bulan.

Berdasarkan data Dirjen Pajak per 2013 total wajib pajak terdaftar sebanyak 25.857.390 yang terdiri atas 2.218.573 wajib pajak badan, 555.995 wajib pajak bendahara, dan sisanya wajib pajak perorangan. Namun, dari total 24 juta, yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak hanya 17 juta. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Priana Wirasaputra mengatakan, Masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak daerah. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung meresmikan penerbitan dan penindakan pajak daerah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah ([metrotvnews.com](http://metrotvnews.com)).

Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, kepatuhan membayar pajak tidak hanya bertumpu pada pengusaha namun juga pribadi. Melihat penerimaan pajak yang berkurang juga disebabkan banyaknya peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan di galakannya modernisasi perpajakan, penyampaian SPT kini tidak lagi secara manual, tetapi penyampaian SPT dibuat secara elektronik yang dikenal dengan istilah *electronic SPT* atau biasa disingkat e-SPT. Aplikasi ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan secara cuma-

cumakepadawajibpajak, baikdiberikanlangsungolehfiskus, atauwajibpajakdatangdanmemintasendirike Kantor PelayananPajak (KPP) dimanatempatwajibpajaktersebutterdaftar, ataudapatjugadiunduhdari*websiteresmi*DirektoratJenderalPajak.

Terdapatbeberapafaktor yang mempengaruhi perubahan pelaporan menggunakan SPT manual menjadisistem e-SPT didasariadanyapenumpukan file di KPP karenabanyaknya data SPT yang harusdirekam di sisteminformasiperpajakan di KPP, sehinggaseringterjadiperbedaan penghitungan antarawajibpajakdengan KPP yang memerlukanwaktucukup lama untukmelakukanrekonsiliasi. Makadenganadanya e-SPT diharapkandapatmenyempurnakanadministrasiperpajakan di Indonesia, sertadapatmempermudahwajibpajakdalammenghitungdanmelaporkankewajibanpe rpajakanya, yang bertujuan agar dapatmempercepatDirektoratJenderalPajakdalammenyelesaikanpemeriksaanpajak.

Penggunaan SPT secaraelektronikinimempunyaimanfaatantaralainpenyampaian SPT dapatdilakukansecaracepatdanamankarenalampiran-lampirandilaporkanmelalui media elektronikseperti *CD (Compact Disk)*, *disket*, *flash disk* atau media elektroniklainnya. Selainituperhitunganmenjadilebihcepatdantepatkarena menggunakan komputer sertamenghindaripemborosankertas. Hal laindiadakannya e-SPT

yaitu untuk menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam penerapan e-SPT dapat ditunjang dengan pengetahuan perpajakan yang telah diketahui oleh wajib pajak itu sendiri, karena kewajiban pajak yang terkait dalam penerapan e-SPT yaitu mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan penghasilan yang didapat oleh wajib pajak tersebut (Gustiyan, 2014)

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Akuntansi Pajak

Sri Ernawati (2011)

2. Penerapan e-SPT

Novi Purnama (2014), Lulu Azzahra (2014), Firdaus Aprian (2015)

3. Sanksi Pajak

Thia Dwi Utami (2013), Yohana Laura (2016)

4. Kesadaran Wajib Pajak

Ratriana Dyah Safri (2013), Thia Dwi Utami (2013), Yohana Laura (2016)

5. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Septiyani Nur Khasanah (2014)

6. Pengetahuan Pajak

Firdaus Aprian (2015), Septiyani Nur Khasanah (2014), Yohana Laura (2016)

7. Kualitas Pelayanan

Donny Halim (2014)

## 8. Sikap Wajib Pajak

Donny Halim (2014)

Tabel 1.1

Penelitian Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

No	Peneliti	Thn	Pemahaman Akuntansi Pajak	Penerapan e-SPT	Sanksi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Modernisasi Sistem Administrasi	Pengetahuan Pajak	Kualitas Pelayanan	Sikap Wajib Pajak
1.	Sri Ernawati	2011	√	-	-	-	-	-	-	-
2.	Novi Purnama	2014	-	√	-	-	-	-	-	-
3.	Lulu Azzahra	2014	-	√	-	-	-	-	-	-
4.	Firdaus Aprian	2015	-	√	-	-	-	√	-	-
5.	Thia Dwi Utami	2013	-	-	√	√	-	-	-	-
6.	Ratriana Dyah Safri	2013	-	-	-	√	-	-	-	-
7.	Septiyani Nur Khasanah	2014	-	-	-	-	√	√	-	-
8.	Donny Halim	2014	-	-	-	-	-	-	√	√
9.	Yohana Laura	2016	-	-	√	√	-	X	-	-

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian sebelumnya yaitu Sri Ernawati dan Lulu Azzahra. Peneliti Sri Ernawati memiliki judul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin” penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 di Banjarmasin, dengan hipotesis penelitian yaitu Pemahaman akuntansi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan Perusahaan Dagang yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Sampel yang digunakan adalah seluruh wajib pajak yang melaporkan pajak penghasilannya di kantor pelayanan pajak pratama Banjarmasin yang berjumlah 37 wajib pajak badan. Dengan teknik metode *purposive sampling*, jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber dalam perusahaan ini adalah data primer. Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Ernawati ini bahwa faktor Pemahaman Akuntansi Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu populasi dan sampel yang digunakan terlalu sedikit sehingga hasil yang didapatkan kurang akurat.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Lulu Azzahra dengan judul “Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang dilakukan ada



tahun 2014 di Bandung, memiliki hipotesis dengan Penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar wajib SPT. Sampel yang digunakan adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega melaporkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT dan melaporkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan e-SPT. Dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana pada tingkat signifikansi 5%, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lulu Azzahra ini dapat disimpulkan bahwa Secara parsial penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dalam hal jumlah sampel yaitu hanya 35 responden. Bagi peneliti selanjutnya perlu memperluas jumlah sampel penelitian serta variasi responden penelitian bukan hanya wajib pajak orang pribadi tetapi juga meliputi wajib pajak badan.

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan	Faktor Pemahaman Akuntansi pajak memberikan kontribusi yang cukup besar	Meneliti pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi atas pemenuhan	Tempat dan waktu penelitian dan peneliti menambahkan satu variable.

	Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di KPP Palembang Hilir Timur (2005) Ruliyanti Susi Wardhani	terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.	pajak	
2	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha bidang perdagangan di KPP Pratama Banjarmasin (Jurnal SPRED-April 2011, Volume 1, Nomor 1) Sri Ernawati, Mellyana Wijaya	Faktor Pemahaman Akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan . Pemahaman akuntansi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP	Meneliti pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi atas pemenuhan pajak	Tempat dan waktu penelitian dan peneliti menambahkan satu variable.
3	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Tasikmalaya (2012) Ade Saepudin	Pemahaman akuntansi pajak dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di	Meneliti pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi atas pemenuhan pajak	Tempat dan waktu penelitian dan peneliti menambahkan satu variable.

		Kota Tasikmalaya.		
4	Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Kasus Pada KPP Madya Malang) (2014) Novi Purnama	Pada pengujian simultan yang telah dilakukan, diperoleh hasil secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.	Meneliti Penerapan e-SPT	Tempat dan waktu penelitian dan peneliti menambahkan satu variable.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mengingat pentingnya pemahaman akuntansi pajak dan penerapan e-SPT dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan ekonomi Indonesia. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Akuntansi Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Bojonegara.

2. Bagaimana Penerapan e-SPT pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
4. Seberapa besar Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara secara parsial maupun simultan

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubung dengan latar belakang dan rumusan masalah, Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Akuntansi Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui Penerapan e-SPT pada Wajib Pajak Oranng Pribadi yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara secara parsial maupun simultan

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Adapun kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

#### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan.

#### **b. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan Pemahaman akuntansi pajak dan Penerapan e-SPT,

sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dibandingan perpajakan dan sumber informasi khususnya pemahaman mengenai pemahaman akuntansi pajak dan penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

## 1.5 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara yang bertempat di Jl. Terusan Dr. Soetami No.2 Bandung 40151. Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan September 2016 sampai selesai.